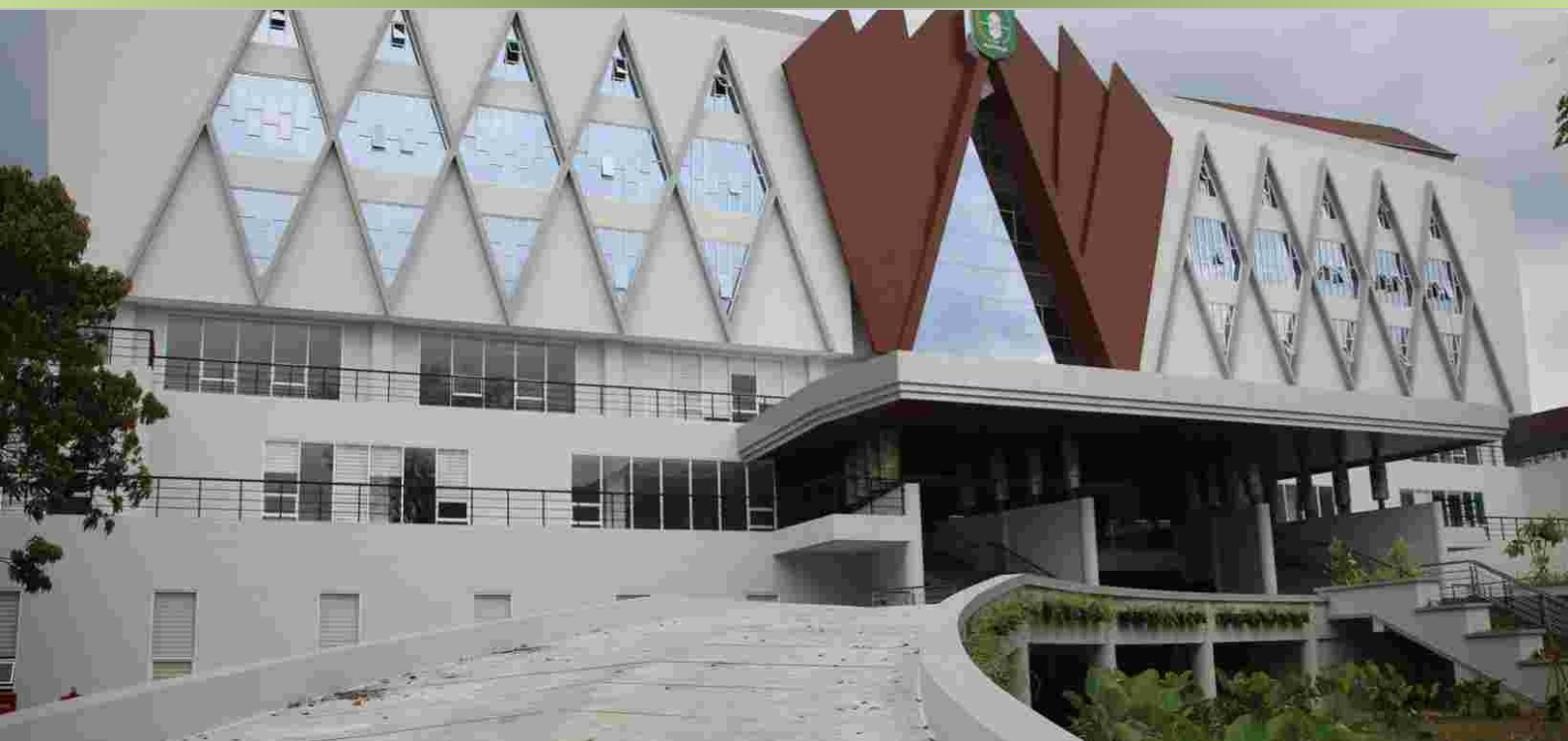




# RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**JALAN ADISUCIPTO NO 50 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78124  
TELEPON 08115656122 LAMAN [WWW.PERKIM.KALBARPROV.GO.ID](http://WWW.PERKIM.KALBARPROV.GO.ID)  
POS-ELDISPERKIM@KALBARPROV.GO.ID**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebagai suatu dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat satu tahun kedepan diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Barat pada sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025. Renja SKPD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 yang diharapkan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan perencanaan kedepan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini masih terdapat kekurangan, namun hal tersebut tidak mengurangi harapan agar Renja SKPD ini bermanfaat dan memberikan andil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman,  
  
Yosafat Triadhi Andjioe, ST,MM,MT  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19691024 199803 1 007

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Dasar Hukum -----	2
1.3 Maksud dan Tujuan -----	5
1.4 Sistematika Penulisan -----	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	
2.1 Alokasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 --	7
2.2 Tabel Alokasi dan Realisasi DPRKP Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2023-----	8
2.3 Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPRKP Prov. Kalbar TA 2023-----	15
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah -----	17
a. Tujuan -----	17
b. Sasaran -----	17
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-----	19
BAB V. PENUTUP -----	44

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan alat untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025.

Rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, salah satu SKPD yang sangat strategis untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan mengacu kepada rencana strategis (renstra) sebagai landasan operasional untuk mencapai hasil maksimal sesuai dengan sasaran kinerja yang menjadi prioritas penanganan.
2. Rencana Kerja merupakan acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat untuk menentukan program dan kegiatan pada Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta perencanaan program kegiatan sehingga menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;

3. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan instrumen dalam rangka untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Hal ini perlu dibuat untuk mengukur capaian kinerja yang telah diprogramkan dan dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kalimantan Barat 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026.

Tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Mudsyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 ( Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 34);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 115);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah :

- a. Menjabarkan arah rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat selama satu tahun kedepan;
- b. Mengukur dan merumuskan serta menyusun kebutuhan anggaran / dana untuk memenuhi pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat selama satu tahun berjalan;
- c. Sebagai landasan dan sekaligus tolok ukur kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.



Adapun Tujuannya adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Menciptakan kepastian dalam perencanaan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

- 2.1. Alokasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023
- 2.2. Tabel Alokasi dan Realisasi Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman DAN Urusan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2023

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

##### **BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024**

##### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat terbentuk melalui penetapan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat .

Dokumen Perencanaan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2023 merupakan Dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023. Jumlah program RKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 yang diakomodir dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebanyak 6 (Enam) program, yaitu : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi; (2) Program Pengembangan Perumahan; (3) Program Kawasan Permukiman; (4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); (5) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; (6) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;. Semuanya terakomodir dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

#### **2.1 Alokasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023**

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perumahan rakyat, urusan kawasan permukiman dan urusan Pertanahan telah dialokasikan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 402.349.842.945 dan telah direalisasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Alokasi dan Realisasi DPRKP Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>12.988.933.379,00</b>	<b>12.652.248.621,00</b>	<b>336.684.758,00</b>	<b>97,41</b>
<b>1.04.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>748.087.500,00</b>	<b>740.844.700,00</b>	<b>7.242.800,00</b>	<b>99,03</b>
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.521.500,00	115.886.000,00	635.500,00	99,45
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.710.700,00	8.535.400,00	175.300,00	97,99
1.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.619.700,00	8.481.500,00	138.200,00	98,4
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.296.000,00	7.887.900,00	408.100,00	95,08
1.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.619.700,00	8.482.700,00	137.000,00	98,41
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.960.700,00	6.813.500,00	147.200,00	97,89
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	590.359.200,00	584.757.700,00	5.601.500,00	99,05
<b>1.04.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.597.987.731,00</b>	<b>8.313.603.823,00</b>	<b>284.383.908,00</b>	<b>96,69</b>
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.814.690.978,00	7.662.531.523,00	152.159.455,00	98,05
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	623.307.500,00	495.345.000,00	127.962.500,00	79,47
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.267.653,00	104.531.000,00	3.736.653,00	96,55

1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.309.800,00	18.056.200,00	253.600,00	98,61
1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.599.900,00	9.546.400,00	53.500,00	99,44
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.723.800,00	10.679.100,00	44.700,00	99,58
1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.088.100,00	12.914.600,00	173.500,00	98,67
<b>1.04.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.289.300,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>99,8</b>
1.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.300.000,00	5.289.300,00	10.700,00	99,8
<b>1.04.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>360.180.000,00</b>	<b>340.303.111,00</b>	<b>19.876.889,00</b>	<b>94,48</b>
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	140.180.000,00	139.882.200,00	297.800,00	99,79
1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	22.982.000,00	2.018.000,00	91,93
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.000.000,00	177.438.911,00	17.561.089,00	90,99
<b>1.04.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>577.675.050,00</b>	<b>574.053.867,00</b>	<b>3.621.183,00</b>	<b>99,37</b>
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.817.838,00	25.781.100,00	36.738,00	99,86
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.923.000,00	66.885.400,00	37.600,00	99,94
1.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	24.827.000,00	173.000,00	99,31
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	24.840.000,00	160.000,00	99,36

1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.500.000,00	66.056.800,00	1.443.200,00	97,86
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.500.000,00	9.375.000,00	125.000,00	98,68
1.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	4.872.000,00	128.000,00	97,44
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.684.212,00	221.600.167,00	84.045,00	99,96
1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.300.000,00	13.294.400,00	5.600,00	99,96
1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	117.950.000,00	116.522.000,00	1.428.000,00	98,79
<b>1.04.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.078.734.950,00</b>	<b>1.072.801.348,00</b>	<b>5.933.602,00</b>	<b>99,45</b>
1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	146.226.000,00	144.683.100,00	1.542.900,00	98,94
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.112.850,00	353.179.248,00	1.933.602,00	99,46
1.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	577.396.100,00	574.939.000,00	2.457.100,00	99,57
<b>1.04.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>999.178.148,00</b>	<b>985.260.232,00</b>	<b>13.917.916,00</b>	<b>98,61</b>
1.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.000.000,00	198.915.239,00	7.084.761,00	96,56
1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793.178.148,00	786.344.993,00	6.833.155,00	99,14
<b>1.04.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>621.790.000,00</b>	<b>620.092.240,00</b>	<b>1.697.760,00</b>	<b>99,73</b>
1.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.905.000,00	74.904.970,00	30	100

1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.300.000,00	88.104.270,00	195.730,00	99,78
1.04.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00	49.950.000,00	50.000,00	99,9
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257.905.000,00	257.111.000,00	794.000,00	99,69
1.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.680.000,00	150.022.000,00	658.000,00	99,56
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>3.484.990.860,00</b>	<b>3.481.203.626,00</b>	<b>3.787.234,00</b>	<b>99,89</b>
<b>1.04.02.1.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>895.152.160,00</b>	<b>895.108.727,00</b>	<b>43.433,00</b>	<b>100</b>
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	66.215.560,00	66.191.400,00	24.160,00	99,96
1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	39.072.800,00	39.053.600,00	19.200,00	99,95
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	789.863.800,00	789.863.727,00	73	100
<b>1.04.02.1.02</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>98.430.400,00</b>	<b>96.672.399,00</b>	<b>1.758.001,00</b>	<b>98,21</b>
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	43.960.000,00	42.202.000,00	1.758.000,00	96

1.04.02.1.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	54.470.400,00	54.470.399,00	1	100
1.04.02.1.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	0	0	0	0
<b>1.04.02.1.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>2.491.408.300,00</b>	<b>2.489.422.500,00</b>	<b>1.985.800,00</b>	<b>99,92</b>
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.116.180.700,00	2.114.199.100,00	1.981.600,00	99,91
1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	375.227.600,00	375.223.400,00	4.200,00	100
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>7.518.287.089,00</b>	<b>7.511.522.900,00</b>	<b>6.764.189,00</b>	<b>99,91</b>
<b>1.04.03.1.01</b>	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>951.895.989,00</b>	<b>948.885.800,00</b>	<b>3.010.189,00</b>	<b>99,68</b>
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	25.332.700,00	25.332.700,00	0	100
1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	625.798.800,00	623.182.200,00	2.616.600,00	99,58
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	300.764.489,00	300.370.900,00	393.589,00	99,87
<b>1.04.03.1.02</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>6.566.391.100,00</b>	<b>6.562.637.100,00</b>	<b>3.754.000,00</b>	<b>99,94</b>

1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	931.427.900,00	929.627.900,00	1.800.000,00	99,81
1.04.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	19.863.800,00	19.844.800,00	19.000,00	99,9
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.971.426.600,00	2.969.491.600,00	1.935.000,00	99,93
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.643.672.800,00	2.643.672.800,00	0	100
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>377.749.474.617,00</b>	<b>366.471.566.339,00</b>	<b>11.277.908.278,00</b>	<b>97,01</b>
<b>1.04.05.1.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>377.749.474.617,00</b>	<b>366.471.566.339,00</b>	<b>11.277.908.278,00</b>	<b>97,01</b>
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	377.687.249.817,00	366.410.232.539,00	11.277.017.278,00	97,01



1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	62.224.800,00	61.333.800,00	891.000,00	98,57
<b>2.10.03</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>213.479.000,00</b>	<b>212.974.447,00</b>	<b>504.553,00</b>	<b>99,76</b>
<b>2.10.03.1.01</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>213.479.000,00</b>	<b>212.974.447,00</b>	<b>504.553,00</b>	<b>99,76</b>
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	213.479.000,00	212.974.447,00	504.553,00	99,76
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>394.678.000,00</b>	<b>392.872.097,00</b>	<b>1.805.903,00</b>	<b>99,54</b>
<b>2.10.04.1.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>394.678.000,00</b>	<b>392.872.097,00</b>	<b>1.805.903,00</b>	<b>99,54</b>
2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	224.658.000,00	224.105.832,00	552.168,00	99,75
2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	170.020.000,00	168.766.265,00	1.253.735,00	99,26
<b>Total</b>		<b>402.349.842.945,00</b>	<b>390.722.388.030,00</b>	<b>11.627.454.915,00</b>	<b>97,11</b>



### **2.3 Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPRKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.988.933.379 dan realisasi keuangan mencapai Rp 12.652.248.621 dengan realisasi fisik 99,70% dan realisasi keuangan 97,41% yang diarahkan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang dalam urusan pelaksanaan pemerintahan daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.484.990.860 dan realisasi keuangan mencapai Rp 3.481.203.626 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,89% yang diarahkan untuk peningkatan dan pengembangan perumahan.

3. Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.518.287.089 dan realisasi keuangan mencapai Rp 7.511.522.900 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,91% yang diarahkan untuk menuntaskan Kawasan kumuh.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 377.749.474.617 dan realisasi keuangan mencapai Rp 366.471.566.339 dengan realisasi fisik 98,91% dan realisasi keuangan 97,01% yang diarahkan untuk meningkatkan sarana, prasarana dan utilitas umum di Kawasan Permukiman.

5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 213.479.000 dan realisasi keuangan mencapai Rp 212.974.447 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,76% yang diarahkan untuk terselenggaranya pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum.

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 394.678.000 dan realisasi keuangan mencapai Rp 392.872.097 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,54% yang diarahkan untuk teratasinya sengketa tanah garapan.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang terinci, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dalam lingkup kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dan sasaran Pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Adapun tujuan dan sasaran yang disusun terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, dan termuat dalam dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

#### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, minimal 1 (satu) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Meningkatnya pelayanan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah dan tertib administrasi pertanahan.

#### **b. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) perumahan rakyat;
2. Meningkatnya Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi;
3. Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman;
4. Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**TAHUN 2025**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
										Nasional			Daerah
1	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						306,675, 216,791						
1.04	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						12.667.4 42.291						

1.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah (Nilai) Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>					<b>12.667.442.291</b>						
1.04.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>7 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>468.858.500</b>						
1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	126,129,000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,485,000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar



		Dokumen RKA SKPD											
1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	1 Dokumen	1 Dokumen	11,373,800	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar	
1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	-	1 Dokumen	1 Dokumen	9,894,400	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar	
1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	6,105,700	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar	

		Perubahan DPA SKPD											
1.04.01.1.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	10,768,400	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	294,102,200	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
<b>1.04.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat</b>					<b>10.538.583.791</b>						Dinas PRKP Provinsi Kalbar

		Daerah										
1.04.01.1.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		74 orang	74 orang	74 orang	9,925,216,791	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3500 Dokumen	2500 Dokumen	2500 Dokumen	565,549,400	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13,422,600	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√	Dinas PRKP Provinsi Kalbar

1.04.01.1.02.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11,477,800	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	11,805,800	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11,111,400	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar

<b>1.04.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>2 Laporan</b>	<b>90,858,000</b>						Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30,858,000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		1 tahun	1 tahun	30 Orang	60,000,000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
<b>1.04.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>10 Laporan</b>	<b>586.928.090</b>						Dinas PRKP Provinsi Kalbar

1.04.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		1 tahun	1 tahun	1 Paket	20,000,0 00	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		49 item	49 item	1 Paket	50,036,9 00	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		19 item	19 item	1 Paket	24,747,5 00	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 tahun	1 tahun	1 Paket	76,485,0 00	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang disediakan		1 tahun	1 tahun	1 Paket	238,265, 000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar

1.04.01.1.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 tahun	1 tahun	1 Dokumen	15,000,000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 tahun	1 tahun	1 Laporan	5,000,000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 tahun	1 tahun	1 Laporan	142,407,700	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 tahun	1 tahun	1 Dokumen	8,905,990	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis		1 tahun	1 tahun	1 Dokumen	6,080,000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar

		elektronik pada SKPD											
<b>1.04.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>242,480,000</b>						Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	1 unit	1 Unit	242,480,000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
<b>1.04.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>542.680.000</b>						Dinas PRKP Provinsi Kalbar



1.04.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 tahun	1 tahun	1 Laporan	190,000,000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		1 tahun	1 tahun	1 Laporan	352,680,000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
<b>1.04.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>				<b>34 Unit</b>	<b>197.053.910</b>						Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.01.1.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			4 Unit	4 Unit	88,275,000	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar

1.04.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		1 tahun	20 Unit	25 Unit	108,778,910	DPRKP Prov. Kalbar	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
<b>1.04.02</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>58.439.600</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>APBD</b>		√	<b>Masyarakat atau instansi pemerintah</b>	<b>Dinas PRKP Provinsi Kalbar</b>
<b>1.04.02.1.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Persentase Data Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>100%</b>	<b>25,452,200</b>						

1.04.02.1.01.003	Pengumpulan Data Rumah Korban bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,452,200	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√	Masyarakat	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
<b>1.04.02.1.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang dibangun dan direhab beserta PSU</b>				<b>100 %</b>	<b>32,987,400</b>	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√		Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	20 rumah	25 rumah	20 Rumah	67 Unit Rumah	32,987,400	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√	Masyarakat	Dinas PRKP Provinsi Kalbar

1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	4 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	33%	10.326.865.200	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Penataan Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha kumuh kewenangan Provinsi	4 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	33%	249,346,000	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.03.1.01.008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar

1.04.03.1.01.00 17	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan				1 Laporan	149,346,000	Provinsi Kalimantan Barat	APBD	√	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.03.1.02	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>Jumlah Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima Belas) Ha</b>	45 Ha	34,68 Ha	20 Ha	15 Ha		10.077.519.200	Provinsi Kalimantan Barat	APBD	√	<b>Masyarakat dan instansi pemerintah</b>	<b>Dinas PRKP Provinsi Kalbar</b>

1.04.03.1.02.00 03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	115 Unit Rumah	25 Unit Rumah	40 Unit Rumah	204 Unit Rumah	6,578,849,700	Provinsi Kalimantan Barat	APBD	√	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.03.1.02.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan			1 Laporan	1,050,418,500	Provinsi Kalimantan Barat	APBD	√	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar

1.04.03.1.02.00 14	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	45 Ha	34,68 Ha	20 Ha	20 Ha	2,448,251,000	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
<b>1.04.05</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Jumlah Ketersediaan PSU di pusat kegiatan local (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>40 PKL</b>	<b>27 PKL</b>	<b>14 Kab/Kota</b>	<b>14 Kab/Kota</b>	<b>282.641.759.800</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>APBD</b>		√	<b>Masyarakat dan instansi pemerintah</b>	<b>Dinas PRKP Provinsi Kalbar</b>
<b>1.04.05.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>Jumlah Ketersediaan PSU di pusat kegiatan local (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat.</b>	<b>14 Kab/Kota</b>	<b>14 Kab/Kota</b>	<b>14 PKL</b>	<b>14 Kab/Kota</b>	<b>282.641.759.800</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>APBD</b>		√	<b>Masyarakat dan instansi pemerintah</b>	<b>Dinas PRKP Provinsi Kalbar</b>

1.04.05.01.000 1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	644,065,800	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.05.01.000 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2050 lokasi	1700 Lokasi	800 Lokasi	1422 Lokasi	270,050,000,000	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
1.04.05.01.000 6	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi			600 Lokasi	11,774,349,000	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar



1.04.05.01.0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi pada Permukiman yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi			50 Lokasi	173,345,000	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>2.10</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>												
<b>2.10.03</b>	<b>Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>82,16%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>107,063,200</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>APBD</b>		<b>√</b>	<b>Instansi yang memerlukan tanah</b>	<b>Dinas PRKP Provinsi Kalbar</b>
2.10.03.1.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen			4 Dokumen	107,063,200	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		√	Instansi yang memerlukan tanah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar

2.10.04	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	100%	99,98%	100%	100%	134.111.800	Provin si Kalima ntan Barat	APBD		✓	Masyar akat atau instans i pemer intah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
2.10.04.1.01	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah</b>	100%	99,98%	100%	100%	134.111.800	Provin si Kalima ntan Barat	APBD		✓	Masyar akat atau instans i pemer intah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
2.10.04.1.01.00 03	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	107,281,800	Provin si Kalima ntan Barat	APBD		✓	Masyar akat dan instansi pemer intah yang bersen gketa	Dinas PRKP Provinsi Kalbar

2.10.04.1.01.005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen			2 Dokumen	26,830,000	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat dan instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
2.10.06	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Persentase fasilitasi penetapan obyek dan subyek redistribusi tanah</b>				100%	350.944.500	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
2.10.06.1.01	<b>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				100%	350.944.500	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar

2.10.06.1.01.00 02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			2 Dokumen	95,039,200	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
2.10.06.1.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam Rangka Reforma Agraria	Berita Acara			2 Berita Acara	107,063,200	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
2.10.06.1.01.00 04	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Laporan			2 Laporan	16,909,900	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar

2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara			2 Berita Acara	107,281,800	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
2.10.06.1.01.0006	Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara			2 Berita Acara	24,650,400	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
<b>2.10.07</b>	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	<b>Persentase Fasilitasi Survey dan Pemetaan Tanah Ulayat Lintas Kabupaten/Kota</b>				<b>100%</b>	<b>244,976,800</b>	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar

2.10.07.1.01	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				100%	244,976,800	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
2.10.07.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan survey dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2 Laporan	244,976,800	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
2.10.10	<b>PROGRAM PENATAGUNAN TANAH</b>	<b>Persentase Fasilitas Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>				100%	143,613,600	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar

2.10.10.1.01	<b>Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hambarannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hambarannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)</b>				100%	143,613,600	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar
2.10.10.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Provinsi				2 Laporan	143,613,600	Provinsi Kalimantan Barat	APBD		✓	Masyarakat atau instansi pemerintah	Dinas PRKP Provinsi Kalbar

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan infrastruktur yang ada saat ini, dan keterlibatan para pihak (*stakeholders*) dalam perumahan rakyat, permukiman, dan pertanahan diharapkan akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih baik ke depan.

Sebagai bagian dokumen perencanaan yang bersifat strategis, tentunya Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 terbuka menerima langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang mungkin terjadi.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan kebijaksanaan dan perumusan program kerja dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.